

# Penguatan Posyandu di Konawe, Arinta Sumangerukka Dorong Sinergi dan Transformasi Layanan Dasar

**Konawe, Sultranet.com** - Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Arinta Andi Sumangerukka, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Konawe pada Sabtu, 24 Mei 2024. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarlevel pemerintahan dalam pelaksanaan enam layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Posyandu, sekaligus menyerap aspirasi langsung dari masyarakat desa.

Dalam lawatannya, Arinta menegaskan bahwa Posyandu kini tak lagi sekadar tempat layanan kesehatan dasar, tetapi telah berkembang menjadi pusat pembinaan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat desa. "Kunjungan ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah langkah nyata untuk memberikan pembinaan langsung kepada para kader agar kualitas pelayanan benar-benar meningkat," ujarnya.

Enam layanan dasar yang menjadi fokus pembinaan meliputi kesehatan ibu dan anak, imunisasi, gizi, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, kesehatan lingkungan, serta pelayanan kesehatan usia produktif dan lanjut usia.

Kegiatan diawali di Posyandu Desa Ameroro, Kecamatan Uepai, lalu dilanjutkan ke Posyandu Desa Kasumeia, Kecamatan Onembute. Mengusung tema "Posyandu Anak Bangsa", kegiatan ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam memperkuat pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat desa.

Arinta menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Pemerintah Kabupaten Konawe dan partisipasi aktif kader Posyandu. Ia juga menekankan pentingnya data yang akurat di Posyandu sebagai dasar perencanaan pembangunan. "Data yang valid adalah fondasi pembangunan yang tepat sasaran. Hal ini juga selaras dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 yang memperkuat peran Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa," tuturnya.

Ia mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah desa, OPD kabupaten, hingga pemerintah provinsi agar Posyandu mampu menjadi ujung tombak pelayanan dasar di masyarakat. “Semua pihak harus terlibat aktif. Dengan gotong royong, kita bisa wujudkan Posyandu yang inklusif dan berdampak,” tambah Arinta.

Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Konawe, Hj. Hania, menyampaikan rasa syukur atas kunjungan tim provinsi. “Kehadiran Ibu Arinta memberi semangat baru. Ini motivasi bagi para kader untuk bekerja lebih giat dan bersinergi dalam mengembangkan Posyandu,” katanya.

Dua Posyandu yang dikunjungi disebutkan sebagai contoh penguatan program Posyandu di Konawe yang bisa direplikasi di desa lainnya. Ia berharap, pembinaan ini menjadi awal perubahan menuju pelayanan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Selain menjadi agenda pembinaan, kunjungan ini juga merupakan bagian dari persiapan menghadapi Lomba Posyandu Tingkat Nasional yang akan digelar pada Agustus 2024 mendatang. Arinta menekankan pentingnya momentum tersebut sebagai media evaluasi dan perbaikan. “Kita ingin memastikan Posyandu tidak hanya bagus dari tampilan luar, tapi juga aktif menjalankan perannya untuk masyarakat,” tegasnya.

Menurut Arinta, lomba ini bukan sekadar ajang prestasi, tetapi peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari sisi kelembagaan, keterlibatan masyarakat, hingga inovasi. “Saya yakin Konawe bisa tampil sebagai salah satu yang terbaik. Semangat gotong royong di sini sangat kuat,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Bupati Konawe, jajaran kepala OPD, Ketua Tim Penggerak PKK, para kepala desa, unsur Forkopimda, dan para kader Posyandu. Selain dialog dan sambutan, Arinta juga menyerahkan bantuan sosial secara langsung kepada masyarakat sebagai bentuk nyata dukungan Pemerintah Provinsi Sultra.

Kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung transformasi Posyandu menjadi pusat layanan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan di tingkat desa. Dengan semangat bersama dan fokus pada pengembangan SDM, Posyandu diyakini mampu menjawab tantangan zaman dan membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat.

---

# Posyandu Jadi Garda Terdepan Pelayanan Dasar, Ketua TP-PKK Sultra Kunjungi Kolaka Timur

**Kolaka Timur, Sultranet.com** - Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sulawesi Tenggara, Arinta Andi Sumangerukka, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kolaka Timur untuk melakukan pembinaan Posyandu serta mendorong percepatan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di desa dan kelurahan. Kegiatan berlangsung pada Sabtu, 24 Mei 2025, di Desa Tasahea, Kecamatan Tirawuta, serta Kelurahan Tababu.

Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan Provinsi Sulawesi Tenggara menghadapi Lomba Posyandu Tingkat Nasional yang akan digelar Agustus mendatang. Lebih dari itu, kunjungan ini bertujuan untuk menguatkan peran strategis Posyandu sebagai pusat layanan terpadu masyarakat, yang kini tidak lagi hanya terbatas pada sektor kesehatan.

Dalam sambutannya di hadapan para kader dan masyarakat, Arinta menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan publik.

“Kolaborasi dan koordinasi lintas sektor sangat penting. Kita butuh keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan—baik pemerintah desa, OPD kabupaten, maupun provinsi—agar Posyandu menjadi garda terdepan pelayanan dasar di masyarakat,” ujarnya.

Arinta juga menyerahkan bantuan secara langsung kepada masyarakat dan kader Posyandu, berupa perlengkapan pemadam kebakaran, paket sembako, serta perlengkapan kesehatan. Bantuan ini diharapkan mampu memperkuat semangat gotong royong dan meningkatkan kualitas layanan Posyandu.

“Kita ingin kader Posyandu tak hanya fokus pada kesehatan balita dan lansia, tetapi juga menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Mulai dari

masalah sanitasi, rumah tidak layak huni, pendidikan, hingga persoalan sosial lainnya harus bisa ditangani secara terpadu,” tutur Arinta.

Ia menambahkan bahwa peran Posyandu kini telah berevolusi menjadi pusat layanan masyarakat yang menyentuh enam bidang utama sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, yakni kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan ketertiban masyarakat.

Bupati Kolaka Timur, H. Abdul Azis, menyampaikan apresiasi atas perhatian Ibu Arinta terhadap masyarakat Koltim. Ia menyebut kunjungan tersebut membawa semangat baru bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya para kader Posyandu.

“Kehadiran Ibu Arinta sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi bukan hanya membawa semangat, tetapi juga bantuan yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” ucap Bupati dalam sambutannya.

Salah satu titik perhatian kunjungan berada di Posyandu Desa Tasahea, yang kini menjadi Posyandu percontohan dengan tingkat partisipasi mencapai 95 persen. Posyandu ini telah mengintegrasikan empat jenis layanan UKPM (Upaya Kesehatan Perdesaan Mandiri), yaitu Posyandu Balita dan Ibu Hamil, Posyandu Lansia, Posbindu Penyakit Tidak Menular, dan Posyandu Remaja.

Arinta memberikan apresiasi terhadap dedikasi para kader dan lansia di desa tersebut. Ia menyebut semangat mereka sebagai teladan dalam menjalankan peran aktif di tengah masyarakat.

“Luar biasa ibu-ibu lansia dan para kader kita. Di usia yang tidak muda lagi, mereka tetap aktif melayani dan mendukung pembangunan di desa,” kata Arinta penuh haru.

Dalam penutupan kegiatan, Arinta secara simbolis menyerahkan bantuan kepada perwakilan kader, lansia, dan masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut mampu menjadi penguat semangat kerja para kader dan mempererat hubungan sosial antara masyarakat dan pemerintah.

“Bantuan ini bukan sekadar simbol. Ini adalah bentuk nyata komitmen kita untuk hadir dan mendukung langsung di lapangan. Kita ingin Posyandu menjadi tempat masyarakat merasa aman, nyaman, dan terbantu,” tambahnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat baru dalam penguatan

Posyandu sebagai pusat layanan dasar yang inklusif dan adaptif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan penuh dari pemerintah provinsi, kabupaten, hingga desa, Posyandu di Sulawesi Tenggara diharapkan mampu menjadi model pelayanan publik yang efektif dan manusiawi.

---

# Peringati Hari Keanekaragaman Hayati, Pemkab Kolot Tanam Pohon di Pantai Berova

**Kolaka Utara, Sultranet.com** - Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Internasional dengan menggelar aksi lingkungan di Pantai Berova, Kecamatan Lasusua, Jumat 23 Mei 2025.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kolaka Utara itu diawali dengan apel siaga yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE. Dalam apel tersebut, Jumarding mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan peringatan Hari Keanekaragaman Hayati sebagai momentum refleksi atas pentingnya menjaga alam.

“Ini bukan hanya seremonial. Ini pengingat untuk kita semua bahwa kekayaan hayati adalah penyangga kehidupan. Kalau kita abai, maka dampaknya akan kembali ke kita juga,” ujar Jumarding di hadapan para peserta apel.

Wakil Bupati menekankan bahwa menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari hal besar. Justru, menurutnya, perubahan dimulai dari tindakan sederhana namun konsisten. “Mari kita mulai dari hal kecil: menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, memakai produk ramah lingkungan, dan sadar akan pentingnya konservasi. Semua ini bisa kita lakukan bersama,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap ajakan tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan aksi tanam pohon di sekitar area Pantai Berova. Wakil Bupati bersama peserta kegiatan—yang terdiri dari aparatur sipil negara, pelajar, aktivis lingkungan, dan

masyarakat umum—secara simbolis menanam bibit pohon yang telah disiapkan oleh panitia.

Pantai Berova dipilih sebagai lokasi kegiatan karena kawasan ini merupakan salah satu pesisir yang memiliki potensi keanekaragaman hayati laut dan darat yang masih terjaga. Dengan penanaman pohon di area tersebut, Pemkab Kolaka Utara berharap dapat mendorong peningkatan kualitas ekosistem sekaligus meningkatkan kesadaran warga untuk ikut menjaga kawasan pesisir dari kerusakan lingkungan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kolaka Utara, Suhardi, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program strategis pemulihan lingkungan yang telah dicanangkan pemerintah daerah. Ia menilai, partisipasi publik dalam kegiatan seperti ini sangat penting karena pelestarian alam tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata.

“Kami butuh kolaborasi dari semua pihak. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan ini, kami berharap ada rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap lingkungan,” jelas Suhardi.

Dalam kesempatan itu, para pelajar juga diberikan edukasi singkat tentang pentingnya keanekaragaman hayati dan peran mereka dalam menjaga lingkungan sejak usia dini. Materi disampaikan dengan pendekatan interaktif agar mudah dipahami, sekaligus membangun kesadaran ekologis generasi muda.

Selain penanaman pohon, acara juga diisi dengan pameran produk daur ulang dari sampah plastik, yang diprakarsai oleh kelompok-kelompok sadar lingkungan dari berbagai desa di Kolaka Utara. Produk-produk ini menunjukkan bahwa sampah bisa memiliki nilai ekonomi jika dikelola dengan benar, sekaligus menjadi solusi pengurangan sampah plastik di masyarakat.

Kegiatan ini diakhiri dengan penyerahan bibit pohon secara simbolis kepada perwakilan masyarakat dan sekolah, sebagai dorongan agar gerakan menanam pohon dapat terus berlanjut di luar kegiatan peringatan ini.

Pembab Kolaka Utara berharap, melalui peringatan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional ini, tumbuh kesadaran kolektif untuk menjaga alam sebagai warisan yang tidak ternilai bagi generasi mendatang.

---

# Bupati Bombana Canangkan Gerakan “Berani Bersih Wonuaku”

**Bombana, Sultranet.com** — Pemerintah Kabupaten Bombana memulai langkah nyata menuju lingkungan yang bersih dan tertata dengan meluncurkan program “Berani Bersih Wonuaku”, Jumat, 23 Mei 2025. Program ini merupakan bagian dari 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2025-2030, yang diawali dengan aksi bersih-bersih serentak di berbagai kecamatan.

Bupati Bombana, Ir. Burhanuddin, M.Si, turun langsung ke lapangan untuk meninjau pelaksanaan kegiatan yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, serta warga setempat. Aksi ini mencakup pembersihan saluran air, pengangkutan sampah, hingga penataan ruang publik. Masyarakat terlihat antusias bergotong royong bersama aparat pemerintah demi mewujudkan lingkungan yang nyaman dan sehat.

Dalam keterangannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar seremonial, melainkan awal dari upaya kolektif membangun kesadaran lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Bombana.

“Kami ingin menanamkan semangat gotong royong dan tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang layak huni. Ini bukan hanya program pemerintah, tapi gerakan seluruh masyarakat Bombana,” kata Burhanuddin saat ditemui di lokasi kegiatan.

Program “Berani Bersih Wonuaku” dirancang sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola lingkungan sekaligus mengubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya kebersihan. Sejak hari pertama peluncuran, program ini telah menjadi penggerak semangat baru di tengah warga.

Kegiatan bersih-bersih dilakukan secara masif di pusat kota maupun wilayah kecamatan. Di beberapa titik, warga terlihat bergandengan tangan bersama petugas kebersihan dan aparat desa membersihkan sampah dan merapikan

fasilitas umum. Bupati menyebut, partisipasi aktif masyarakat menjadi indikator utama kesuksesan program ini.

“Kalau semua orang terlibat, maka perubahan akan lebih mudah dan terasa. Kami tidak ingin ini berhenti di 100 hari kerja, tapi menjadi budaya hidup bersih yang terus tumbuh,” ujar Burhanuddin.

Menurutnya, inisiatif ini juga dirancang untuk membentuk karakter masyarakat yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan tempat tinggal mereka. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bombana akan mengintegrasikan program ini dengan kegiatan rutin pemerintahan, termasuk melalui pelibatan sekolah, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal.

Program ini juga diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam membangun pendekatan pembangunan yang dimulai dari hal-hal mendasar. Burhanuddin meyakini, pembangunan fisik dan sosial akan berjalan beriringan jika kebersihan dan kerapian lingkungan dijadikan fondasi awal.

“Perubahan itu harus dimulai dari sesuatu yang sederhana, dan membersihkan lingkungan adalah salah satunya. Ini tentang keberanian untuk peduli, keberanian untuk memulai,” ungkapnya.

Pemerintah daerah juga telah menginstruksikan agar seluruh OPD tidak hanya melibatkan diri dalam kegiatan fisik, tetapi turut menyosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan kepada warga di setiap kesempatan. Upaya ini dinilai sebagai bentuk sinergi antara pelayanan publik dan partisipasi warga dalam pembangunan.

Sejumlah warga yang ikut serta dalam kegiatan tersebut mengaku senang dan merasa dilibatkan secara langsung oleh pemerintah. Mereka berharap kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut dan tidak berhenti hanya karena target 100 hari kerja.

“Kalau bisa rutin seperti ini. Kami jadi lebih merasa memiliki tanggung jawab. Apalagi kalau Bupati sendiri datang lihat langsung, itu membuat kami lebih semangat,” kata Arif, warga Kecamatan Rumbia.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan bahwa pembangunan tidak harus dimulai dari proyek besar, melainkan dari niat kolektif

dan keberanian untuk bersih.

---

# Perempuan Sultra Didorong Kuasai Public Speaking untuk Perkuat Peran Sosial

**Kendari, sultranet.com** - Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulawesi Tenggara, Arinta Andi Sumangerukka, secara resmi membuka Seminar Public Speaking Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sultra yang digelar di Hotel Claro Kendari, Jumat (23/5/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk memperkuat kapasitas perempuan dalam berorganisasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi aktif di tengah masyarakat.

Seminar ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Penasehat DWP Provinsi Sultra, Ratna Lada Hugua, Ketua DWP Provinsi Sultra, Hj. Wa Ode Munanah Asrun Lio, serta para ketua dan anggota DWP dari kabupaten/kota se-Sultra dan organisasi perangkat daerah lingkup Pemprov Sultra. Hadir sebagai narasumber dari Jakarta, Linda Nur Lestari, yang menyampaikan materi bertajuk *Effective Presentation & Public Speaking*.

“Perempuan adalah pemimpin utama dalam keluarga, terutama dalam hal pendidikan. Maka dari itu, kita harus terus meng-upgrade diri dengan pengetahuan dan kemampuan baru,” kata Arinta dalam sambutannya.

Ia menekankan bahwa tantangan perempuan ke depan semakin kompleks. Oleh sebab itu, organisasi seperti Dharma Wanita Persatuan harus menjadi ruang yang berkualitas, produktif, dan berdaya guna dalam mendukung program pembangunan daerah dan nasional.

“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus DWP Sultra atas terselenggaranya seminar ini. Ini adalah bentuk kontribusi nyata terhadap kemajuan perempuan dan pembangunan daerah,” ujarnya sebelum

secara resmi membuka kegiatan dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim”.

Ketua Panitia, Iffah Insyirah Mukty Parinringi, dalam laporannya menjelaskan bahwa tema *Public Speaking* dipilih dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota DWP, baik dalam organisasi maupun kontribusi eksternal terhadap masyarakat.

Ada tiga fokus utama dari seminar ini. Pertama, meningkatkan kemampuan komunikasi serta kepercayaan diri. Kedua, membekali peserta dengan keterampilan berbicara di depan umum secara efektif. Ketiga, memperkuat sinergi dan kolaborasi antaranggota DWP se-Sultra agar organisasi lebih solid dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Sementara itu, Ketua DWP Provinsi Sultra, Hj. Wa Ode Munanah Asrun Lio, dalam sambutannya menyebutkan bahwa anggota DWP merupakan salah satu pilar penting dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Ia menekankan pentingnya semangat belajar yang tidak mengenal usia.

“Kita ini madrasah pertama bagi anak-anak kita. Ilmu yang kita pelajari hari ini, meskipun tampak sederhana, akan sangat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bahkan diri sendiri,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh anggota untuk memahami struktur dan administrasi organisasi, termasuk pentingnya kartu anggota sebagai identitas resmi. Menurutnya, kolaborasi antara DWP provinsi, kabupaten/kota, dan OPD harus terus diperkuat agar program-program yang dijalankan selaras dengan visi pembangunan Sultra.

Dalam aspek kelembagaan, Munanah menekankan pentingnya menjaga etika organisasi. Hal ini mencakup kedisiplinan dalam penggunaan seragam, penyusunan dokumen kegiatan, hingga pelaporan administrasi secara sistematis dan profesional.

“Organisasi kita harus tertata rapi agar mampu berjalan sesuai arah kebijakan nasional dan tetap dipercaya publik,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi antusiasme seluruh peserta dan berharap agar materi yang disampaikan dalam seminar bisa diterapkan secara nyata dalam kehidupan

sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun dalam kontribusi sosial kemasyarakatan.

Kegiatan seminar ini menjadi langkah nyata DWP Provinsi Sultra dalam mendorong anggotanya agar lebih percaya diri berbicara di depan umum serta memperkuat peran mereka sebagai perempuan aktif, komunikatif, dan inspiratif. Melalui penguatan kapasitas komunikasi ini, DWP Sultra diharapkan dapat tampil sebagai organisasi yang lebih tangguh, berdaya saing, dan relevan dalam setiap lini pembangunan, baik daerah maupun nasional.

Dengan semangat kolaboratif dan tekad meningkatkan kualitas sumber daya perempuan, Dharma Wanita Persatuan Sultra melangkah lebih jauh untuk menciptakan perubahan yang bermakna, bukan hanya di ranah domestik, tapi juga dalam peran publik yang semakin luas.

---

# **Perpustakaan Desa di Kolaka Utara Dinilai, Bunda Literasi Dorong Inovasi Literasi Masyarakat**

**Kolaka Utara, Sultranet.com** — Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kembali menggelar Lomba Perpustakaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten tahun 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat budaya baca dan mengembangkan literasi masyarakat di wilayah pedesaan.

Kegiatan penilaian lapangan dimulai pada Kamis, 22 Mei 2025, dengan melibatkan langsung Bunda Literasi Kabupaten Kolaka Utara, Dra. Hj. Andi Nurhayani Nur Rahman, yang hadir sebagai salah satu anggota dewan juri. Kehadirannya memberikan semangat tersendiri bagi para pengelola perpustakaan desa dalam menumbuhkan inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan layanan

literasi.

Dua desa yang menjadi lokasi awal penilaian lapangan adalah Desa Totallang dan Desa Woitombo. Tim juri yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan pegiat literasi melakukan kunjungan langsung untuk menilai manajemen perpustakaan, koleksi buku, pemanfaatan teknologi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan literasi.

“Perpustakaan desa bukan hanya tempat membaca buku, tetapi juga ruang edukasi, pemberdayaan, dan inovasi. Saya bangga melihat geliat literasi yang terus tumbuh di desa-desa kita,” ujar Dra. Hj. Andi Nurhayani Nur Rahman saat memberikan sambutan di sela-sela penilaian.

Di Desa Woitombo, Kepala Desa Muh. Akbar menjelaskan bahwa pihaknya menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat dengan pendekatan inklusif. “Alhamdulillah, perpustakaan desa sekarang sudah menjadi tempat berkumpulnya anak-anak, ibu-ibu PKK, komunitas, dan kelompok warga lainnya. Mereka membaca, berdiskusi, hingga mengikuti pelatihan keterampilan dasar,” katanya.

Sementara itu, di Desa Totallang, Kepala Desa mengungkapkan bahwa pembangunan perpustakaan dilakukan secara bertahap melalui Dana Desa. Selain membangun fisik gedung, mereka juga membentuk relawan literasi dari kalangan warga dan menjalin kerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk pelatihan pengelola dan penambahan koleksi buku.

“Partisipasi warga sangat tinggi. Mereka merasa memiliki dan ikut menjaga serta memanfaatkan perpustakaan desa sebagai ruang bersama,” ujarnya.

Lomba Perpustakaan Desa dan Kelurahan ini merupakan bagian dari program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang telah diterapkan secara konsisten di Kolaka Utara. Program ini mendukung visi Kabupaten Kolaka Utara sebagai daerah yang Madani, Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan, dengan mendorong peran strategis perpustakaan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Aspek penilaian dalam lomba ini mencakup berbagai indikator penting, mulai dari ketersediaan dan keberagaman koleksi buku, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, tingkat kunjungan dan keterlibatan masyarakat, hingga

dampaknya terhadap peningkatan literasi dan pemberdayaan warga.

Dialog langsung dengan pengelola perpustakaan, perangkat desa, dan masyarakat menjadi bagian penting dari proses penilaian, untuk melihat sejauh mana perpustakaan mampu menjawab kebutuhan informasi dan menjadi pusat aktivitas warga.

Kegiatan penilaian ini akan terus berlangsung dalam beberapa hari ke depan dengan mengunjungi desa-desa lainnya. Diharapkan, melalui lomba ini, semakin banyak desa yang terinspirasi untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan literasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemkab Kolaka Utara berharap lomba ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang apresiasi terhadap kerja keras pengelola perpustakaan desa yang telah berkontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang melek informasi, kreatif, dan berdaya saing.

---

## **Pemkab Bombana Gelar Sidang Isbat Nikah Terpadu, 51 Pasangan Dapat Kepastian Hukum**

**Bombana, Sultranet.com** - Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Sidang Terpadu Isbat Nikah Tingkat Kabupaten Bombana Tahun 2025 sebagai bagian dari program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Kegiatan ini berlangsung di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, pada Rabu, 21 Mei 2025.

Sebanyak 51 pasangan suami istri dari berbagai desa se-Kabupaten Bombana mengikuti sidang terpadu tersebut. Mereka adalah pasangan yang telah menikah secara agama, namun belum memiliki legalitas hukum dalam bentuk akta nikah yang tercatat oleh negara.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, secara resmi membuka kegiatan ini.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa sidang isbat nikah bukan hanya soal administrasi, tetapi berkaitan erat dengan hak-hak dasar masyarakat, khususnya perlindungan terhadap status hukum keluarga dan masa depan anak-anak mereka.

“Program ini bukan hanya terkait status hukum, tetapi juga berhubungan dengan masa depan anak-anak serta akses mereka terhadap layanan umum, seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, kegiatan ini akan kami lakukan secara teratur sepanjang masa kepemimpinan saya,” ujar Bupati Burhanuddin di hadapan peserta dan tamu undangan.

Ia menambahkan, pasangan yang belum memiliki surat nikah kerap menghadapi kesulitan dalam mengakses berbagai layanan publik, mulai dari pembuatan akta kelahiran anak, registrasi kartu keluarga, hingga layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan adanya sidang terpadu ini, pemerintah hadir memberikan solusi menyeluruh melalui satu layanan terintegrasi yang efisien dan mudah diakses.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Pengadilan Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, unsur Forkopimda, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Bombana, jajaran Pengadilan Negeri Bombana, Penjabat Sekda, kepala OPD, camat dan kepala desa se-Kabupaten Bombana, serta tokoh pemuda dan tokoh agama.

Program sidang terpadu ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bombana, Pengadilan Agama, Kantor Kementerian Agama, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melalui kerja sama ini, masyarakat mendapatkan kemudahan mulai dari pengesahan pernikahan hingga penerbitan akta nikah dan dokumen kependudukan lainnya.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bombana, H. Adnan Saufi, S.Pd., M.Si., menyampaikan bahwa pelaksanaan sidang terpadu akan terus dikembangkan. “Kami akan terus memperluas cakupannya. Tidak hanya dari sisi jumlah peserta, tetapi juga jangkauan wilayahnya. Tujuannya agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan, selain memberikan perlindungan hukum, program ini turut memperkuat tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Bombana, serta

mendukung akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial dan publik secara lebih luas.

Antusiasme peserta sidang terpadu kali ini menjadi cerminan bahwa masih banyak masyarakat yang membutuhkan dukungan dari pemerintah dalam hal legalisasi pernikahan. Dengan legalitas yang jelas, anak-anak dari pasangan tersebut juga akan lebih mudah memperoleh dokumen identitas diri yang penting bagi kelangsungan hidup dan pendidikan mereka.

Kegiatan ini menjadi bukti konkret komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana di bawah kepemimpinan Ir. H. Burhanuddin dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. Mereka bertekad membangun Bombana yang lebih tertib secara administrasi, inklusif dalam layanan publik, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan pelaksanaan sidang terpadu yang akan dilakukan secara berkala, Pemkab Bombana berharap semakin banyak keluarga di daerah ini yang memperoleh kepastian hukum dan perlindungan sosial yang layak, sekaligus memperkuat sendi-sendi pembangunan masyarakat yang berdaya dan bermartabat.

---

## **Pemkab Bombana Serahkan Alsintan ke 19 Kelompok Tani**

Bombana, Sulawesi Tenggara — Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian melalui penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada 19 kelompok tani yang tersebar di berbagai kecamatan.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dalam sebuah acara yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Bupati pada Rabu, 21 Mei 2025. Acara tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, jajaran Dinas Pertanian, serta para petani penerima manfaat.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa bantuan ini bukan sekadar distribusi alat pertanian, melainkan bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada petani lokal. Ia juga memberi peringatan tegas agar bantuan ini tidak disalahgunakan.

“Bantuan ini harus digunakan sebagaimana mestinya. Tidak boleh dijual, tidak boleh ada pungutan atau bayaran sebelum alat digunakan. Ini murni untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kalau ada yang menyalahgunakan, kami akan tindak tegas melalui jalur hukum,” kata Burhanuddin dengan nada serius di hadapan para undangan.

Adapun alsintan yang dibagikan meliputi traktor roda dua, traktor roda empat, dan handsprayer. Bantuan ini diharapkan dapat mempercepat proses tanam dan panen, sekaligus meningkatkan efisiensi kerja petani di lapangan.

Lebih jauh, Burhanuddin meminta jajaran Dinas Pertanian untuk memastikan bahwa bantuan tersebut digunakan secara optimal dan tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pemanfaatan alsintan tersebut.

“Saya minta Dinas Pertanian dan semua pihak terkait melakukan evaluasi minimal tiga bulan sekali. Pemerintah itu bukan hanya sekadar memberi lalu pergi. Kita harus pastikan apakah alat-alat ini masih layak digunakan dan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan hasil panen masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga menggarisbawahi bahwa peran aktif masyarakat, khususnya kelompok tani, sangat dibutuhkan untuk menjaga dan merawat bantuan yang telah diberikan. Ia berharap agar alsintan tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok, tetapi juga dapat mendorong kerja sama dan solidaritas antarpetani.

Sementara itu, para kelompok tani penerima manfaat menyambut baik program ini. Mereka menyatakan kesiapannya untuk menjaga dan memanfaatkan alsintan secara bertanggung jawab.

“Kami merasa sangat terbantu. Bantuan ini akan meringankan pekerjaan kami di sawah. Kami akan menjaga baik-baik alat ini dan memakainya sesuai kebutuhan,” ujar salah satu ketua kelompok tani usai menerima bantuan.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas petani. Dengan adanya modernisasi alat pertanian, diharapkan para petani dapat bekerja lebih cepat, efisien, dan menghasilkan panen yang lebih baik.

Program distribusi alsintan ini juga sejalan dengan visi Pemkab Bombana dalam membangun sektor pertanian yang berkelanjutan dan berbasis teknologi tepat guna. Pemerintah berharap langkah ini dapat menjadi pemicu semangat para petani untuk terus berkembang dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Bantuan alsintan kali ini menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian petani, sekaligus mendorong terciptanya sistem pertanian yang lebih modern dan kompetitif.

Dengan peran aktif semua pihak, dari pemerintah hingga kelompok tani, keberlanjutan program ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dari sektor pertanian yang selama ini menjadi salah satu penopang utama kehidupan masyarakat Bombana.

---

## **Bupati Bombana Pimpin Upacara Harkitnas ke-117, Serahkan SK CPNS dan PPPK**

**Bombana, Sultranet.com** - Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 di halaman Kantor Bupati Bombana, Selasa (20/5/2025). Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si bertindak sebagai inspektur upacara dan memimpin langsung jalannya kegiatan yang berlangsung khidmat dan tertib.

Upacara yang menjadi simbol semangat nasionalisme itu turut dihadiri Wakil Bupati Bombana, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Penjabat Sekretaris Daerah, para staf ahli dan asisten, Kepala OPD, unsur Forkopimda, ASN, serta

CPNS dan PPPK formasi tahun 2024 yang akan segera mengemban tugas di lingkup pemerintahan daerah.

Dalam amanat tertulis Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Republik Indonesia yang dibacakan Bupati Burhanuddin, ditegaskan pentingnya menjadikan Harkitnas sebagai momen untuk meneguhkan arah perjalanan bangsa. Pemerintah, kata dia, telah menetapkan Asta Cita sebagai kompas utama dalam merancang kebangkitan nasional menuju Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

“Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum bersejarah yang menandai lahirnya kesadaran nasional sebagai sebuah bangsa. Kini, semangat itu harus kita gelorakan kembali dalam konteks pembangunan dan transformasi digital yang merata dan inklusif,” ujar Burhanuddin saat membacakan amanat Menkomdigi.

Ia melanjutkan, tantangan zaman menuntut kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam menguasai teknologi digital, serta meningkatkan komitmen terhadap pelayanan publik. “Kerja kolaboratif, penguasaan teknologi, dan semangat pelayanan adalah bentuk nyata dari kebangkitan nasional hari ini,” ucapnya.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun anggaran 2024. SK tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Bombana kepada sejumlah perwakilan CPNS dan PPPK yang telah dinyatakan lulus seleksi dan siap bertugas.

Penyerahan SK ini disambut haru dan penuh semangat oleh para penerima. Banyak di antara mereka mengungkapkan rasa syukur dan tekad untuk mengabdikan diri sebaik mungkin. “Alhamdulillah, ini adalah awal perjalanan pengabdian saya sebagai ASN. Saya siap memberikan yang terbaik untuk masyarakat Bombana,” ujar salah satu CPNS usai menerima SK.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilakukan pemasangan stiker logo Pemerintah Kabupaten Bombana pada seluruh kendaraan dinas yang merupakan aset daerah. Aksi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam pemanfaatan aset publik.

Secara simbolis, Bupati Bombana memasang langsung stiker pada salah satu

kendaraan dinas yang telah disiapkan di lokasi upacara. Langkah ini, menurutnya, adalah bentuk pengingat bagi seluruh pengguna kendaraan dinas agar lebih bijak dan bertanggung jawab.

“Stiker ini bukan hanya simbol. Ini adalah pesan moral bahwa aset pemerintah harus digunakan untuk kepentingan rakyat dan dirawat dengan baik. Etika penggunaan kendaraan dinas menjadi tanggung jawab kita bersama,” tutur Burhanuddin.

Kegiatan peringatan Harkitnas tahun ini mencerminkan semangat kolektif Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendorong nilai-nilai kebangkitan nasional ke dalam praktik nyata pelayanan publik. Tak hanya menjadi seremoni tahunan, momen ini sekaligus menjadi panggung komitmen bersama dalam membangun Bombana yang lebih maju dan inklusif.

---

# Sultra Dorong Pengendalian Inflasi dan Percepatan Koperasi Desa Merah Putih

**Kendari, Sultranet.com** - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Rakor ini sekaligus menjadi momen sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ini diikuti oleh seluruh gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia, serta pejabat kementerian dan lembaga terkait. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan sejumlah narasumber lain turut hadir memberikan arahan.

Agenda utama rapat ini adalah membahas langkah-langkah konkret pengendalian inflasi daerah sepanjang tahun 2025 sekaligus memperkuat pemahaman pemerintah daerah tentang Inpres No. 9 Tahun 2025 yang menginstruksikan percepatan pembentukan koperasi di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi dan pembentukan koperasi memerlukan sinergi kuat antar lembaga dan pemerintah daerah. "Pembentukan koperasi ini sangat membutuhkan peran aktif kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bupati dan wali kota sebagai pembina harus memfasilitasi percepatan pembentukan koperasi. Ini adalah program strategis nasional yang wajib didukung seluruh jajaran pemerintah," ujarnya.

Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan menyampaikan amanat Presiden Prabowo Subianto melalui dua kebijakan kunci: Inpres No. 9 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan. Satgas ini bertugas di tingkat nasional hingga kabupaten/kota dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

"Presiden ingin desa-desa tumbuh dan berkembang, petani serta nelayan sejahtera, dan rantai pasok kebutuhan pokok dipersingkat agar harga tetap terkendali. Koperasi adalah kunci untuk mencapai semua itu," tegas Zulkifli Hasan.

Satgas tersebut memiliki lima tugas utama: koordinasi kebijakan antar kementerian/lembaga dan pemda, memastikan pembentukan 80.000 koperasi desa, pemetaan potensi desa/kelurahan, pendampingan kelembagaan dan sumber daya manusia, serta menyelesaikan hambatan melalui mekanisme debottlenecking.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widiasanti memaparkan perkembangan inflasi di minggu ketiga Mei 2025. Berdasarkan data BPS, terdapat kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di tujuh provinsi, sementara 31 provinsi lainnya mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya. Komoditas utama penyumbang kenaikan harga adalah cabai rawit dan cabai merah. Beberapa bahan pokok lain seperti bawang putih, minyak goreng, telur ayam ras, dan daging ayam ras mengalami fluktuasi harga.

“Perlu kewaspadaan ekstra terhadap harga beras dan telur ayam ras karena ini merupakan konsumsi harian masyarakat,” kata Amalia.

Dalam arahannya, Mendagri melalui Sekretaris Jenderal Kemendagri menginstruksikan seluruh kepala daerah dan dinas terkait untuk aktif memonitor harga bahan pokok strategis seperti beras, telur ayam ras, daging ayam ras, minyak goreng, dan bawang putih guna menyusun langkah pengendalian inflasi yang efektif.

Dari Sulawesi Tenggara, Gubernur Andi Sumangerukka didampingi sejumlah pejabat tinggi daerah seperti Asisten II Sekda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Sultra. Kolaborasi lintas sektor ini menegaskan komitmen Sultra dalam mendukung pengendalian inflasi sekaligus suksesnya program pembentukan Koperasi Merah Putih.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa, Sultra berharap upaya stabilisasi harga dan penguatan ekonomi rakyat dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini diharapkan bisa menjadi kunci penguatan ekonomi desa dan ketahanan pangan nasional.